



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Peran Strategis APIP dalam rangka Meningkatkan Kualitas Dokumen Anggaran K/L

"Mengawal Implementasi Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran"

Inspektur Jenderal

Jakarta, 14 Juli 2020



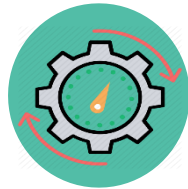
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN

Integritas Profesionalisme Sinergi Pelayanan Kesempurnaan

Outline



Pendahuluan



Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)



Peran APIP untuk peningkatan kualitas dokumen Anggaran K/L



Simpulan



Pendahuluan

REFORMASI PENGANGGARAN



2017 **Presiden Joko Widodo**

“Ada waduk, tidak ada irigasi.
Ada pelabuhan, tidak ada jalan.
Ini tidak terkonsolidasikan baik antara
pusat dan daerah. Berarti
**orientasinya hanya proyek bukan
output atau outcome.**”



2018 **Menkeu Sri Mulyani**

“K/L agar memiliki kemampuan
**penyerapan belanja negara yang
efektif dan menggunakan
anggaran dana secara tepat
sasaran.**”

Visi:

Terwujudnya Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong

5 Arahan Utama Presiden:

1. Pembangunan SDM
2. Pembangunan Infrastruktur
3. Penyederhanaan Regulasi
4. Penyederhanaan Birokrasi
5. Transformasi Ekonomi

**MONEY FOLLOW
PROGRAM**

**ANGGARAN
BERBASIS KINERJA**

Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)

LATAR BELAKANG RSPP

BEFORE

Money follows function

Anggaran belum berorientasi pada Outcome

Belanja tidak efisien dan kurang tepat sasaran

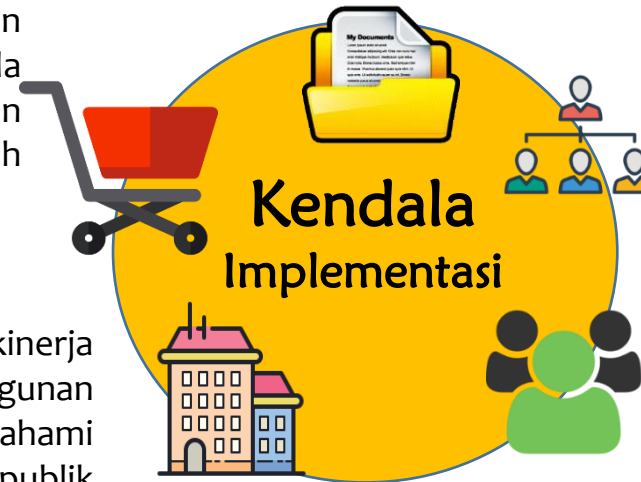
AFTER

Money follows program

Perbedaan antara Program yang digunakan di dalam dokumen perencanaan dan penganggaran

Ketidaksinkronan Program pada belanja pusat dan belanja daerah

Informasi kinerja pembangunan sulit dipahami publik



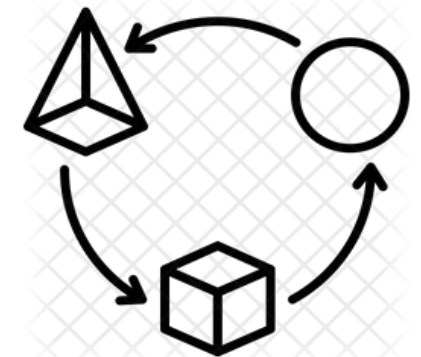
Rumusan nomenklatur Program dan Outcome tidak terlihat dan bersifat normatif

Banyaknya output kecil yang tidak riil dan bukan produk final yang diterima oleh masyarakat

NOW

RSPP

REDESAIN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN



TUJUAN DAN IMPLIKASI RSPP



TUJUAN

Memperkuat penerapan PBK:

- 01** mewujudkan kebijakan *money follow program*
- 02** mengurangi terjadinya tumpang tindih program dan kegiatan antar Kementerian/Lembaga
- 03** meningkatkan integrasi belanja Pemerintah Pusat dan Daerah.

IMPLIKASI



- 01** Program mencerminkan tugas fungsi K/L
- 02** Outcome mencerminkan hasil kinerja Program yang ingin dicapai secara Nasional
- 03** Kegiatan mencerminkan aktivitas untuk menghasilkan keluaran/output
- 04** Output Kegiatan mencerminkan "real work" atau "eye catching".



RSPP di Kemenkeu



12 PROGRAM

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenkeu
2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan
3. Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi di Bidang Keuangan Negara
4. Pengelolaan Anggaran Negara
5. Peningkatan Kualitas Hub. Keuangan Pusat & Daerah
6. Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
7. Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
8. Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak
9. Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai
10. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
11. Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara & Pel. Lelang
12. Pelayanan Perijinan Ekspor dan Impor melalui Portal INSW



5 PROGRAM 2021



Potensi kelemahan RSPP



Perumusan kegiatan masih berpotensi menghasilkan jumlah kegiatan yang banyak



Perumusan satuan volume Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) masih berpotensi menimbulkan kendala



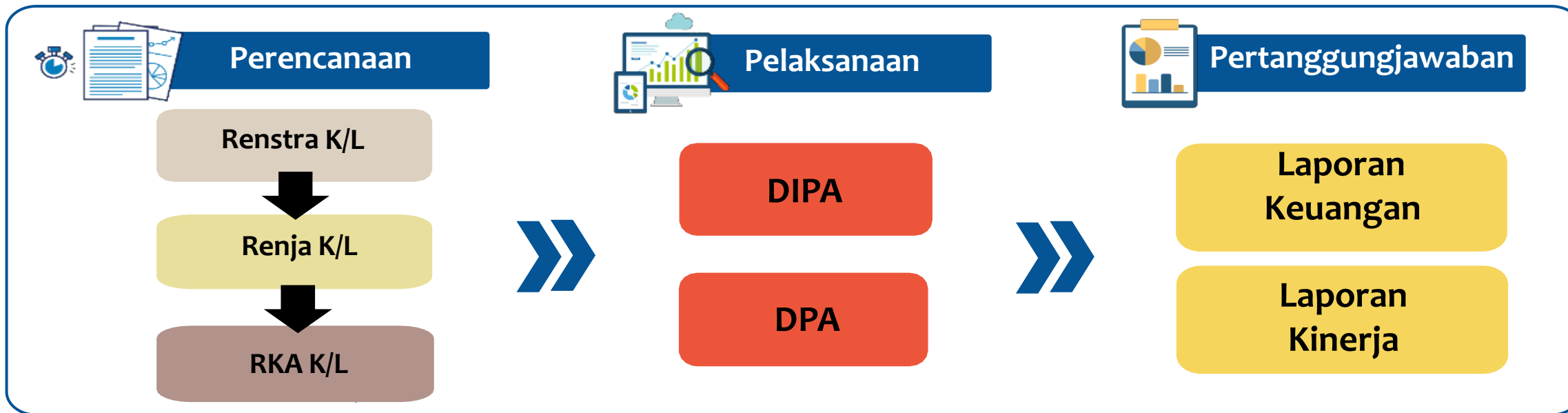
Masih adanya penggunaan komponen dan subkomponen



SEB Pedoman RSPP belum memberikan panduan penyelarasan perencanaan kinerja dengan perencanaan anggaran, pedoman perumusan informasi kinerja (input, proses, *output*, *outcome*, indikator kinerja), dan pedoman penerapan *logic model*.

Peran APIP untuk Peningkatan Kualitas Dokumen Anggaran K/L

Pengawasan APIP K/L dalam Pengelolaan APBN



Consulting/Pendampingan:

- *Trilateral Meeting*
- *Penyusunan Renstra dan Renja K/L (selaras Prioritas Nasional)*

Reviu

RKA K/L (*alokasi sesuai prioritas*)

Audit, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan Lainnya

- *Revisi Anggaran,*
- *3E dan Ketaatan,*
- *Investigasi Kasus Fraud*

Consulting

Helpdesk PBJ

Reviu Laporan Keuangan dan Evaluasi SAKIP

Kesesuaian dengan standar

Pendampingan BPK dan evaluasi

Menpan-RB

Komunikasi dan koordinasi UE I dg BPK atau MenpanRB

Reviu RKA-K/L



RUANG LINGKUP

1. Kelayakan anggaran (*value for money*)
2. Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran
3. Kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L
4. Rincian anggaran Inisiatif Baru dan/atau Perubahan Rincian Angka Dasar pada level komponen.

REDESAIN SISTEM PERENCANAAN PENGANGGARAN & KELENGKAPAN DATA DUKUNG

KESESUAIAN ALOKASI ANGGARAN DENGAN POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA K/L

PENERAPAN KAJIDAH-KAJIDAH PERENCANAAN PENGANGGARAN

KESESUAIAN AKUN

HAL-HAL YANG HARUS DIALOKASIKAN

HAL-HAL YANG DIBATASI (KENDARAAN, MESS, WISMA, DLL)

KEGIATAN YANG DIDANAI DARI PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI DAN DALAM NEGERI

ANGGARAN DENGAN SUMBER DANA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA (SBSN)

ANGGARAN DENGAN SUMBER DANA PNB

BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

MULTIYEARS CONTRACT (MYC)

PENGADAAN DAN REHABILITASI GEDUNG/KANTOR/RUMAH NEGARA

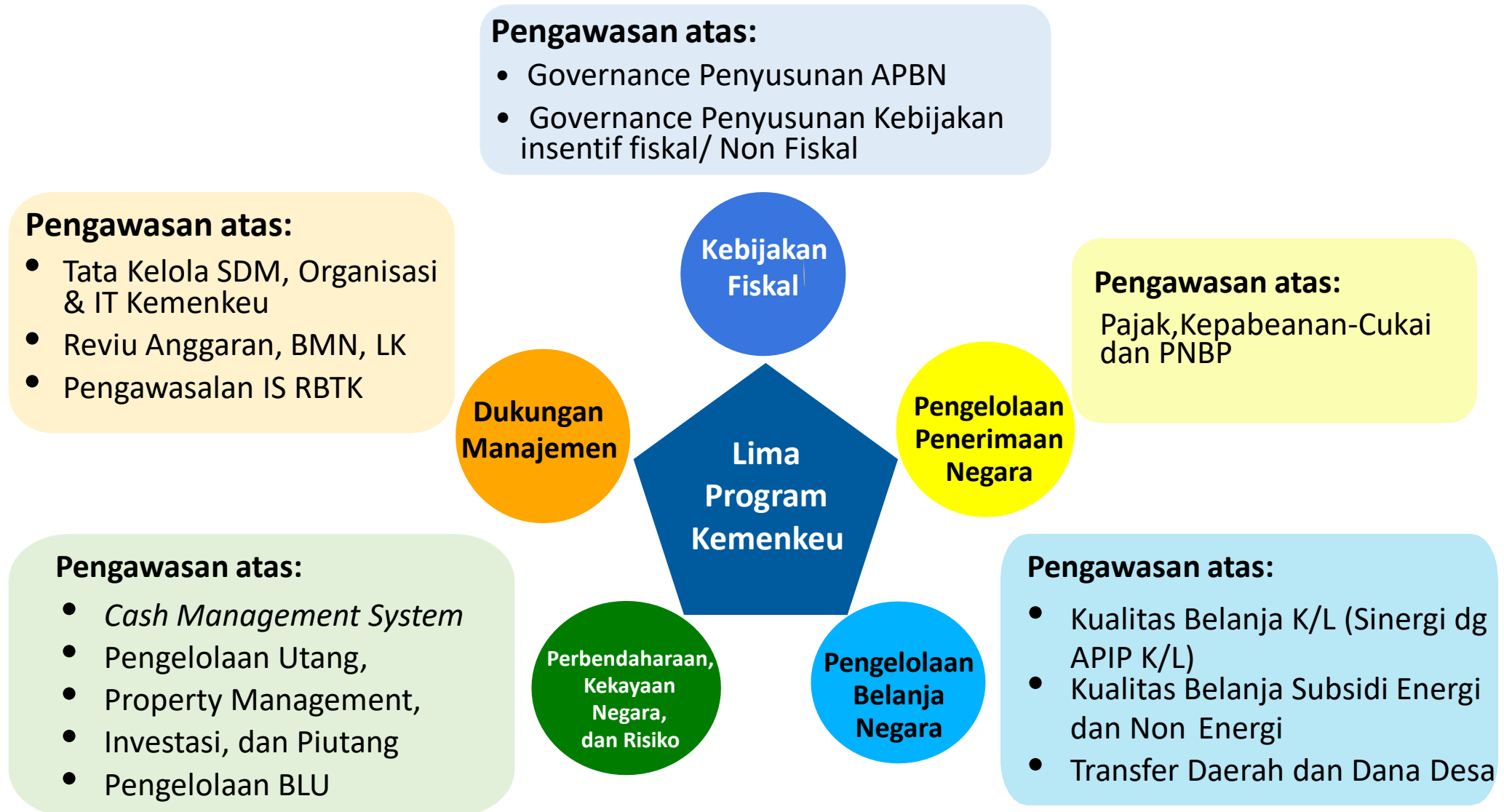
KUALITAS DAN RELEVANSI ARG

KPBU-AP

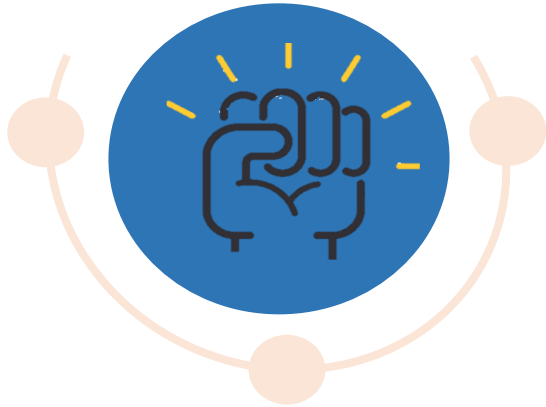
- KRO layanan perkantoran
- KRO Tusi satker
- program/kegiatan terkait pencapaian PN, PB dan/atau PPD
- kegiatan lanjutan yang bersifat MYC
- dana pendamping kegiatan yang bersumber dari PHLN.

Sinkronisasi dengan hasil RKBMN

Alignment Strategi Pengawasan Itjen dengan RSPP Kemenkeu



Simpulan



PP 60 Tahun 2008

- Ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas
- Peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko
- Kualitas tata kelola

Kebijakan Pengawasan

- Memastikan Renstra K/L selaras dengan kebijakan dan program prioritas nasional RPJMN 2020-2024
- Memastikan perencanaan dan penganggaran K/L konsisten mencapai sasaran jangka menengah termasuk Proyek Unggulan dan Prioritas Nasional
- Mengawal Program Strategis K/L tidak hanya fokus pada yang sifatnya operasional Unit Eselon I
- Memastikan kebijakan pengawasan Itjen selaras dengan Redesain Sistem Penganggaran



Tujuan & Area pengawasan


- Terwujudnya kesiapan implementasi RSPP K/L
- Meningkatnya kualitas penganggaran K/L
- Meningkatnya kualitas *spending*
- Meningkatnya sinergi APIP dalam implementasi RSPP K/L


Terima Kasih


Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan

Gedung Djuanda II Lantai 4-13
Jl DR Wahidin Nomor 1, Jakarta 10710
Telp. (021) 3865430

 www.itjen.kemenkeu.go.id

 ItjenKemenkeu

 ItjenKemenkeu

 itjenkemenkeu

